

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN LUAS WILAYAH DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL STUDI EMPIRIS DI PROVINSI JAWA TIMUR

Robin Keswando ¹⁾

Suharno ²⁾

Djoko Kristianto ³⁾

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail : ¹⁾ robin.keswando@gmail.com

²⁾ suharno_mm_akt@yahoo.co.id

³⁾ djokokristianto@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research aims to see the significant impact of the original Income influence area (PAD), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and the regional width to the capital expenditure allocation. The research population is all over the districts and/or cities in East Java Province, in the period of 2012-2014. The number of samples used is the whole districts and/or cities in East Java Province, thus it belongs to census research. The data analysis technique used is the multiple linear regression analysis. The partial analysis result concludes that PAD and the regional width positively and significantly influence the capital expenditure allocation while DAU and DAK do not significantly influence the capital expenditure allocation. The result of the analysis simultaneously shows a conclusion that PAD, DAU, DAK, and the regional width positively and significantly influence the capital expenditure allocation. The determination coefficient analysis result obtains the Adjusted R Square value = 0,892 which shows that the influence given by the independent variables, which are PAD, DAU, DAK, and the regional width to the capital expenditure allocation is about 89,2% while the 10,8% rest is influenced by other variables outside the variables examined.

Keywords: PAD, DAU, DAK, regional, capital expenditure

PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diberlakukannya otonomi daerah memberi kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki secara efektif dan efisien dan mengembangkan potensi daerah yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk mendukung jalannya pemerintahan yang mandiri, maka Pemerintah Daerah perlu mencari dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang ada di daerah. Sumber-sumber daya yang telah dikelola oleh Pemerintah Daerah menjadi salah satu sumber pendanaan bagi belanja daerah, belanja daerah disini lebih diarahkan pada belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal.

Belanja modal memiliki peranan penting karena belanja modal menjadi pendukung dari peningkatan sarana dan prasarana bagi pelayanan publik. Untuk membiayai pengeluaran kegiatan belanja modal tersebut maka dibutuhkan sumber-sumber penerimaan. Sumber penerimaan daerah terdiri atas PAD, DAU, DAK.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian, pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi dan dapat menggali apa yang menjadi keunggulan daerah supaya dapat memberikan kontribusi penerimaan dana bagi daerahnya tersebut, sehingga daerah tersebut dapat menjadi daerah yang mandiri dan dapat menyejahterakan masyarakatnya. Sebaliknya apabila suatu daerah tersebut tidak mampu mengoptimalkan dan mengelola PAD-nya maka akan berdampak pada pembiayaan kegiatan-kegiatan yang ada di daerah tersebut.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum. DAU merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana tersebut Pemerintah Daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal.

Alasan pemilihan objek penelitian di Provinsi Jawa Timur adalah sesuai dengan fenomena yang terjadi di Pemprov Jatim mengalami peningkatan belanja modal khususnya khususnya belanja langsung, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap pembiayaan-pembiayaan lainnya yang menggunakan Pendapatan Daerah sebagai sumber dananya.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wandira (2013) menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, hal ini bertolak belakang penelitian yang dilakukan oleh Sheila Ardhian Nuarisa (2013) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah negatif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sheila Ardhian Nuarisa (2013) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Dina dkk (2014) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Sheila Ardhian Nuarisa (2013) menunjukkan bahwa DAK mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda dan tidak konsisten maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Luas Wilayah Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh signifikansi pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Luas Wilayah Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal. Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2014.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi sebagai bahan evaluasi di hari mendatang dalam melihat peningkatan alokasi belanja modal dari tahun ke tahun apakah mengalami kenaikan atau tidak yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai acuan untuk

memprediksi belanja modal di tahun yang akan datang dan memberikan masukan baik bagi Pemerintah Daerah kaitannya dengan faktor-faktor penentu alokasi belanja modal, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan bermanfaat. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian di masa yang akan datang di bidang yang sama.

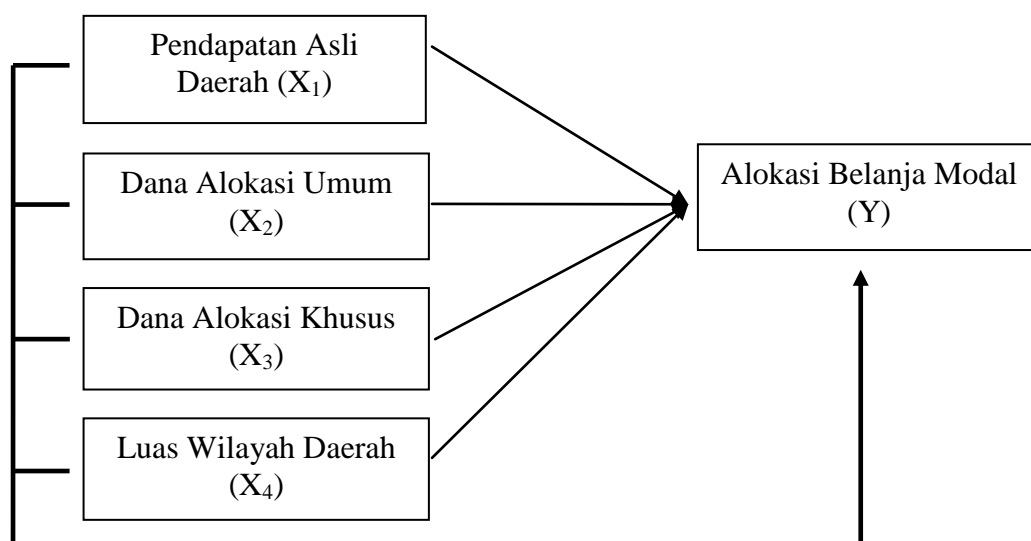
METODE PENELITIAN

Ruang lingkup

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2014. Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2014. Jumlah sampel yang digunakan adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sebanyak 38, dengan rincian 29 Kabupaten dan 9 Kota sehingga merupakan penelitian sensus. Jenis data menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi yaitu www.djpk.depkeu.go.id dan www.bps.jatim.go.id. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

Kerangka Pemikiran

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Alokasi Belanja Modal. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah PAD, DAU, DAK, dan Luas Wilayah Daerah. Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₁: PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

H₂: DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

H₃: DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

H₄: Luas Wilayah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

H₅: PAD, DAU, DAK, dan Luas Wilayah Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

Definisi Operasional Variabel yang Digunakan

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**
Pendapatan Asli Daerah menurut UU nomor 12 tahun 2008 adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
2. **Dana Alokasi Umum (DAU)**
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004). Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% yang kemudian disalurkan kepada Provinsi sebesar 10% dan Kabupaten atau Kota sebesar 90% dari total DAU (PP/No. 55/2005 tentang Dana Perimbangan).
3. **Dana Alokasi Khusus (DAK)**
Dana Alokasi Khusus adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik.
4. **Luas Wilayah Daerah**
Luas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (Ardhini, 2011).
5. **Alokasi Belanja Modal**
Menurut Abdul Halim (2008: 73), belanja modal adalah belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan Luas Wilayah Daerah memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) kurang dari 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel lolos uji multikolinearitas.

Tabel 1: Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai <i>Tolerance</i>	VIF
Pendapatan Asli Daerah (X_1)	0,562	1,778
Dana Alokasi Umum (X_2)	0,241	4,145
Dana Alokasi Khusus (X_3)	0,629	1,589
Luas Wilayah Daerah (X_4)	0,280	3,571

Sumber: Data sekunder, 2015 (diolah)

Hasil Uji Autokorelasi menggunakan *Run Test* menunjukkan nilai *Asymp Sig (2-tailed)* sebesar $0,058 \geq 0,05$ yang berarti data yang dipergunakan adalah *random* sehingga tidak terdapat korelasi antar residual. Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser* menunjukkan *probability value* untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar 0,448, Dana Alokasi Umum (X_2) sebesar 0,872, Dana Alokasi Khusus (X_3) sebesar 0,554, dan Luas Wilayah Daerah (X_4) sebesar 0,732, semua *p-value* $> 0,05$ ini berarti model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji Normalitas menunjukkan bahwa semua variabel tersebut normal karena *Unstandardized Residual Asymp Sig (2-tailed)* dari pengujian *Kolmogorov-*

Smirnov Test (K-S) diperoleh nilai sebesar $0,291 > 0,05$. Hal ini menunjukkan keadaan yang tidak signifikan, berarti H_0 diterima artinya bahwa data residual berdistribusi normal.

Analisis Regresi

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu PAD, DAU, DAK, dan Luas Wilayah Daerah terhadap variabel terikat yaitu Alokasi Belanja Modal. Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 21, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2: Rangkuman Uji Regresi Linear Berganda

Model	B	T	Sig.
Konstanta	76733488,925	2,603	0,011
PAD	0,562	22,311	0,000
DAU	0,083	1,583	0,116
DAK	0,205	0,558	0,578
Luas wilayah Daerah (LWD)	34547,102	2,385	0,019
Adjusted R ²	0,892		
F hitung	229,773		
Sig. F	0,000		

Sumber: Data sekunder, 2015 (diolah)

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 76.733.488,925 + 0,562X_1 + 0,083X_2 + 0,205X_3 + 34.547,102X_4$$

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa nilai F hitung pada model penelitian sebesar 229,773 dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini adalah tepat.

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,892. Hal ini berarti 89,2% variasi variabel PAD, DAU, DAK, dan Luas Wilayah Daerah sedangkan Sisanya 10,8% ($100\% - 89,2\%$) dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Pengujian Hipotesis

Hasil penelitian dari tabel 2 secara parsial menunjukkan bahwa *probability value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sheila Ardhian Nuarisa (2013) dan Imroatus Sholikhah dan Agus Wahyudin (2014) yang menyimpulkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Hasil penelitian dari tabel 2 secara parsial menunjukkan bahwa *probability value* sebesar $0,116 \geq 0,05$ maka H_0 diterima berarti ada pengaruh positif dan tidak signifikan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Imroatus Sholikhah dan Agus Wahyudin (2014) yang menyimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Hasil penelitian dari tabel 2 secara parsial menunjukkan bahwa *probability value* sebesar $0,578 \geq 0,05$ maka H_0 diterima berarti ada pengaruh positif dan tidak signifikan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Arbie Gugus Wandira (2013) yang menyimpulkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Hasil penelitian dari tabel 2 secara parsial menunjukkan bahwa *probability value* sebesar $0,019 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh positif dan signifikan Luas Wilayah Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Imroatus Sholikhah dan Agus Wahyudin (2014) yang menyimpulkan bahwa secara parsial Luas Wilayah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Hasil penelitian dari tabel 2 secara simultan menunjukkan *probability value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Luas Wilayah Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel PAD dan Luas Wilayah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal sedangkan variabel DAU dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil analisis secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan Luas Wilayah Daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Berdasarkan nilai F hitung pada model penelitian sebesar 229,773 dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini adalah tepat. Hasil analisis koefisien determinasi sebesar 89,2% oleh variabel PAD, DAU, DAK, dan Luas Wilayah Daerah, sisanya 10,8% ($100\% - 89,2\%$) dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Oleh karena itu pada penelitian mendatang diharapkan agar menambah variabel independen di luar penelitian yang sekarang yaitu baik variabel keuangan maupun non keuangan dan memperluas waktu penelitian, sehingga hasil yang didapatkan lebih bisa mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. (tidak dipublikasikan) Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Dina, Ni Luh dkk., 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Buleleng tahun 2006-2012. *e-jurnal Bisma*. Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Manajemen. Volume 2 Tahun 2014.
- Djarwanto Ps dan Pangestu Subagyo. 2006. *Statistik Induktif*. BPFE. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- [Http://www.seputartuban.com](http://www.seputartuban.com) diakses 10 Oktober 2015
- [Http://www.lensaindonesia.com](http://www.lensaindonesia.com) diakses 10 Oktober 2015
- Imam Ghozali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Irawati. 2008. *Akuntansi Dasar 1*. Pustaka. Jakarta.
- Irawati. 2008. *Akuntansi Dasar 2*. Pustaka. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Nuarisa, Sheila Ardhan. 2013. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. Volume 2 No. 1 Tahun 2013. Hal 88 – 95
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Belanja Daerah.
Sholikhah, Imroatus dan Wahyudin, Agus. 2014. Analisis Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa. *Accounting Analysis Journal*. UNNES. Hal 553 - 562
Syaiful. 2008. *Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah akuntansi Pemerintah*. Tim Pustaka Yudistira. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 ayat (14) tentang Keuangan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. UNNES. Hal 44 - 51
www.djpk.depkeu.go.id diakses 8 Desember 2015
www.jatim.bps.go.id diakses 8 Desember 2015
Yovita, Farah Marta. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi empiris pada Pemerintah Provinsi Se-indonesia Periode 2008-2010). *Accounting Analysis Journal*. UNNES. Hal 44 - 50